

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan

Tantry Suci Chairani¹, Khairul Anwar Pulungan²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
tantrysucichairani1@gmail.com¹, khairulanwar@umsu.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to examine the application of accrual-based accounting to income carried out by PT. Merapi Utama Pharma Medan, in accordance with applicable laws and regulations. This research uses descriptive analysis methodology. The methodology used in this research involves the use of descriptive statistical analysis for data analysis purposes. The second category of data used in this research consists of information originating from official company documents. Data collection methods used in this research include interviews, surveys, and examination of financial records and other related documents. This research tests and evaluates the implementation of income accrual accounting in accordance with Indonesian laws and regulations (Tax Law) at PT. Merapi Utama Pharmacy, Medan. This research is supported by the use of accessible data, allowing the author to obtain important findings. Company PT. Merapi Utama Pharma Medan has not fully implemented payroll accounting practices in accordance with the requirements and deadlines specified in the relevant tax regulations. Reconciliation reports are generated due to differences in the accounting treatment of income and expenses between the two systems. Financial reconciliation can be classified into two categories based on their duration: permanent and temporary. Financial statements are needed to reconcile the difference between positive and negative cash flow variances. Differences in taxable income can be caused by the recognition of certain expenses in the tax records which are not considered as such in the financial records; These expenses have the capacity to reduce an organization's taxable income.

Keywords: *accrual-based accounting, fiscal reconciliation, fiscal correction.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pendapatan yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan analisis statistik deskriptif untuk tujuan analisis data. Kategori data kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang berasal dari dokumen resmi perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, survei, dan pemeriksaan catatan keuangan serta dokumen terkait lainnya. Penelitian ini melakukan pengujian dan evaluasi penerapan akuntansi akrual pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang Perpajakan) pada PT. Farmasi Merapi Utama Medan. Penelitian ini didukung oleh pemanfaatan data yang dapat diakses, sehingga memungkinkan penulis memperoleh temuan-temuan penting. Perusahaan PT. Merapi Utama Pharma Medan belum sepenuhnya menerapkan praktik akuntansi penggajian sesuai dengan persyaratan dan tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan terkait. Laporan rekonsiliasi dihasilkan karena perbedaan perlakuan akuntansi pendapatan dan pengeluaran

antara kedua sistem. Rekonsiliasi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan durasinya: permanen dan sementara. Laporan keuangan diperlukan untuk merekonsiliasi perbedaan antara varian arus kas positif dan negatif. Perbedaan penghasilan kena pajak dapat disebabkan oleh adanya pengakuan pengeluaran tertentu dalam catatan perpajakan yang tidak dianggap demikian dalam catatan keuangan; pengeluaran ini memiliki kapasitas untuk mengurangi pendapatan kena pajak organisasi.

Kata kunci: akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket laporan keuangan komprehensif, yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan pendapatan dan beban, laporan perubahan aset dan liabilitas, laporan arus kas, dan ikhtisar ringkas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap memiliki kualitas tingkat tinggi jika menunjukkan karakteristik seperti dapat dipahami, relevansi, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan konsisten. Sesuai dengan mandat hukum, semua bisnis, terlepas dari ukurannya, wajib memelihara dokumentasi keuangan komprehensif yang secara tepat menggambarkan status keuangan, efektivitas operasional, dan modifikasi yang berkaitan dengan aset dan liabilitasnya. Pemilihan metode atau pilihan teknis dalam akuntansi berpotensi mempengaruhi pengakuan pendapatan. Hubungan antara pelaporan keuangan dan kebijakan serta prosedur akuntansi tidak dapat dipisahkan. Neraca saldo adalah elemen penting dari laporan keuangan yang tepat, dan bergantung pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keakuratannya (Lumingkewas, 2013).

Laporan kerugian dan keuntungan adalah dokumen keuangan yang memberikan gambaran singkat tentang laporan keuangan suatu organisasi. Kesejahteraannya, yang dibuktikan dengan data mengenai tingkat untung dan ruginya. Variabel utama dalam laporan akuntansi palsu adalah pendapatan dan pengeluaran. Masuknya dana adalah hasil langsung dari pekerjaan yang dilakukan atau tanggung jawab yang dipenuhi (atau kombinasinya) dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang, penyediaan jasa, atau upaya operasional mendasar lainnya dari suatu organisasi. Istilah "beban" mengacu pada terjadinya lonjakan pemanfaatan sumber daya yang menganggur untuk tujuan alternatif atau munculnya tanggung jawab tambahan, atau kombinasi keduanya. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas penting lainnya yang merupakan bagian integral dari operasional suatu bisnis (Hery, 2012).

Penerimaan suap yang dikenal sebagai pendapatan perpajakan di Republik Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara secara umum, yang biasa disebut APBN. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan per gaji menjadi sangat penting karena alasan berikut. Sumber pendapatan di Indonesia terdiri dari berbagai bentuk perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bangunan dan infrastruktur, hibah tanah, dan hak mineral. Akuntansi pemerintah secara konsisten mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Kas

Menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sampai dengan saat ini. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa pengakuan kompensasi terjadi pada saat dana masuk ke kas negara. Penerapan metode cash basis menyederhanakan proses pemungutan dan pelaporan pajak dengan hanya mengandalkan penerimaan pajak moneter yang telah ditentukan sebelumnya, dengan mengabaikan tanggal tertentu penerimaan tersebut diperoleh. Namun, komplikasi muncul karena pendapatan yang dilaporkan sering kali tidak secara akurat menggambarkan keadaan sebenarnya, sehingga menyebabkan akuntansi menjadi lebih sulit dan kurang transparan. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang pembentukan akuntansi pemerintah standar ini telah digantikan oleh peraturan pemerintah tahun 2010 (Peraturan Pemerintah No. 71). Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mencakup sistem SAP berbasis kas dan berbasis akrual. Data yang disimpan dalam sistem SAP disimpan selama empat tahun, terhitung sejak tanggal pembuatannya. Selama proses pembangunan pondasi akrual, kombinasi metodologi teknis dan praktis akan digunakan. Langkah-langkah prosedural yang dilakukan meliputi konversi proyeksi pendapatan dan belanja berbasis tunai dari Badan Pendapatan Daerah (LRA) menjadi proyeksi pendapatan dan belanja berbasis tunai dari Kantor Daerah (LO). Proses peramalan penerimaan pajak yang akan datang dalam laporan operasional meliputi perkiraan penerimaan pajak yang akan diperoleh pada setiap titik pengumpulan. Pos penampung berfungsi sebagai badan pemungutan pajak. Namun demikian, efektivitas pendekatan praktis dinilai melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam konteks pemerintahan. Penerapan sistem SAP berbasis akrual, khususnya dalam bidang akuntansi penggajian, menghadirkan tantangan karena diperkenalkannya kebijakan baru. dikenal dengan penilaian diri. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa pegawai diberikan otonomi untuk secara mandiri menghitung, menyetorkan, dan mengungkapkan kewajiban pajaknya masing-masing. Kendala potensial lainnya berkaitan dengan kesulitan dalam menentukan secara akurat penghasilan kena pajak seseorang. Taksiran penghasilan kena pajak akan dikaitkan dengan metode blended stela untuk menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Adanya badan fiktif yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan, memerlukan rumusan perkiraan penerimaan pajak. Penerapan kerangka normatif berbasis akrasia ini dipersulit oleh kendala terkait sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan di Indonesia saat ini harus didekati dengan pola pikir yang pragmatis dan realistik, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kapasitas yang ada. PT. Merapi Utama Pharma Medan adalah entitas terkemuka di sektor farmasi, yang menyediakan serangkaian layanan komprehensif yang mencakup distribusi peralatan medis, produk farmasi, solusi infus, peralatan terkait, dan makanan kesehatan. PT. Merapi Utama Pharma mendistribusikan produknya ke berbagai perusahaan, termasuk rumah sakit, apotek, toko ritel, supermarket, dan toko serba ada. Alamat yang diberikan yaitu Jalan Tapian Nauli Pasar 1, No. 5, Kec. Sunggal, Kel. Medan Sunggal, Medan 20138. Entitas asosiasi yaitu PT. Merapi Utama Pharma Medan. PT. Merapi Utama Pharma Medan telah menunjukkan kemahiran dalam memperkirakan dan memperhitungkan keuntungan perusahaan dalam bidang

strategi operasional, karena sejauh ini tidak ada tantangan yang dihadapi. Berdasarkan survei awal, laporan keuangan yang disusun oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan ditemukan tidak mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapatan, sebagaimana didefinisikan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), mengacu pada penerimaan uang atau aset berharga lainnya (dikenal sebagai aset). Berdasarkan prinsip ini, sangat penting untuk memasukkan semua pendapatan sebagai komponen pendapatan organisasi komprehensif setiap kali terjadi operasi komersial, seperti penjualan barang atau penyediaan jasa. Konsep penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penyelenggaraan Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Acara Peradilan mengacu pada hak pemerintah pusat. atau pemerintah daerah untuk mengakui peningkatan kekuatan ekonomi dalam tahun anggaran tertentu, tanpa memerlukan pencairan tambahan apa pun. Namun, penting untuk dicatat bahwa penambahan tersebut tidak tunduk pada kemunafilaran. Sebagian besar pengguna standar saat ini menganut prinsip pengakuan pendapatan di hadapan otoritas pemerintah. Waktu spesifik munculnya hak pemerintah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah menggunakan kriteria yang diuraikan dalam Buletin Teknis 24: Akuntansi Pendapatan Pajak untuk mengotentikasi penerimaan pajak. Buletin teknis ini membahas tiga metodologi berbeda dalam akuntansi penghasilan kena pajak, yang didasarkan pada prinsip pemotongan pajak. Metodologi ini mencakup penilaian mandiri, penilaian resmi, dan pemotongan pajak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan metode akuntansi akrual dalam pencatatan transaksi sejak didirikan pada tahun 2010, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi akrual mencatat transaksi pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan kapan transaksi tersebut sebenarnya terjadi. diterima atau diselesaikan. PT. Merapi Utama Pharma Medan bergerak di bidang akuntansi pendapatan, dimana nilai transaksi harian menjadi dasar perhitungan keuangan. Catatan harian ini selanjutnya dikonsolidasikan menjadi ringkasan tahunan. Selanjutnya, PT. Merapi Utama Pharma Medan mendistribusikan produknya melalui jalur tidak langsung antara lain apotek, rumah sakit, dan toko obat. Laporan ini menyajikan data dan proyeksi penjualan PT. Farmasi Merapi Utama Medan pada tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1. Data Realisasi dan Target Penjualan PT. Merapi Utama Pharma Medan.

Tahun	Volume Penjualan (Jutaan Rp)		Persentasi Pencapaian
	Realisasi	Target	
2018	280.816	290.506	97,63%
2019	310.124	330.120	94,81%
2020	390.336	360.110	108,83%
2021	430.322	580.195	74,44%
2022	450.702	680.795	66,43%

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan (2023)

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa target pertumbuhan penjualan yang ditetapkan untuk PT. Merapi Utama Pharma Medan sebesar 108,83 persen baru akan terlampaui pada tahun 2020. Perlu diketahui bahwa PT. Merapi Utama Pharma Medan kemungkinan besar tidak akan mencapai target penjualannya untuk tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022. Penjelasan lebih lanjut terkait perjanjian kerjasama yang terjalin oleh PT. Merapi Utama Pharma Medan dengan supplier-nya khususnya apotek dan toko obat disediakan. Tujuan dari kolaborasi kedua entitas adalah untuk memfasilitasi implementasi inisiatif distribusi yang selaras dengan tujuan dan aspirasi masing-masing kedua belah pihak. Tabel 1.2 menyajikan upaya-upaya yang dilakukan PT. Merapi Utama Pharma Medan dalam rangka meningkatkan komitmen kemitraan dengan para pemasoknya.

Tabel 2. Data kerjasama dan upaya penjualan PT. Farmasi Merapi Utama Medan.

Tahun	Apotik			Toko Obat		
	Jumlah Komitmen	Penjualan Cash	Penjualan Kredit	Jumlah Komitmen	Penjualan Cash	Penjualan Kredit
2018	27	9%	91%	13	10%	90%
2019	14	10%	90%	10	12%	88%
2020	32	6%	94%	24	14%	86%
2021	27	5%	95%	29	9%	91%
2022	19	11%	89%	11	15%	85%

Sumber: Bagian akuntansi dan keuangan (2023)

Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan potensi tren peningkatan di PT. Komitmen kemitraan Merapi Utama Pharma Medan dan persentase penjualan kredit untuk tahun mendatang. Cara pembayaran utama untuk sebagian besar transaksi di apotek dan toko obat adalah melalui kartu kredit, sementara sebagian kecil pembelian diselesaikan secara tunai. Pada tahun 2022 mendatang, apotek diperkirakan akan mengalami lonjakan penjualan tunai sebesar 11%, sedangkan apotek diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 15% di domain yang sama. Hal tersebut mengemuka di divisi akuntansi PT. Merapi Utama Pharma Medan berkaitan dengan praktik penjualan kartu kredit untuk memvalidasi pendapatan setelah pelanggan menyelesaikan pembayaran. Mengingat hal ini hanya berkaitan dengan pusat administrasi pusat, komposisi laporan keuangan relatif tidak rumit. Kantor pusat utama organisasi kami terletak di Jl. Cilosari No. 25 Cikini, Jakarta. PT. Merapi Utama Pharma Medan menghadapi tantangan dalam menerapkan basis kas dan basis akrual dalam akuntansi dan pelaporan keuangannya. Dampaknya adalah adanya data yang tidak tepat seperti yang digambarkan dalam laporan keuangan organisasi, yang berpotensi mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang optimal oleh para eksekutif senior. Selanjutnya permasalahan yang diamati di PT. Merapi Utama Pharma Medan menyoroti adanya inkonsistensi dalam laporan keuangan perusahaan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran penuh sesuai dengan skala faktor pajak, penjualan diakui sebagai pendapatan. Pengakuan atas kemampuan perusahaan dalam menahan laba dari transaksi diakui dalam kerangka

akuntansi basis akrual untuk pendapatan. Pemanfaatan landasan aritmatika ini tidak menimbulkan praduga mengenai waktu diterima atau dikeluarkannya pembayaran. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan kurang akurat karena adanya perbedaan antara saldo akhir akun-akunnya dengan saldo sebenarnya. Keadaan. Selain itu, terbukti bahwa jurnal penjualan belum disesuaikan dengan tepat untuk mewakili secara akurat pendapatan yang sebenarnya diterima perusahaan. Pemanfaatan jurnal penyesuaian sangat penting untuk memastikan pengkinian saldo akun perusahaan secara tepat waktu dan akurat, terutama yang memerlukan penyesuaian akibat penerapan prinsip akuntansi akrual.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis memilih topik penelitian dengan judul: "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual atas Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan."

METODE PENELITIAN

Penyelidikan ini merupakan penelitian deskriptif. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa pendekatan penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan mengkategorikan objek berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada objek tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian dari PT. Merapi Utama Pharma Medan, dengan tujuan untuk menjelaskan metodologi akuntansi akrual. Data yang tersedia dimanfaatkan untuk keperluan inferensi, analisis, dan perbandingan dengan kerangka teori yang ada. Pada akhirnya, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Merapi Utama Pharma Medan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pencatatan Pendapatan Pajak Berbasis Akrual

Dalam bidang akuntansi, transaksi yang berkaitan dengan penerimaan pajak berbasis kas meliputi penerimaan penerimaan pajak, penerimaan restitusi pajak, dan penerimaan penerimaan kas. Pembayaran pajak yang diterima oleh pemerintah langsung disetorkan ke rekening Kas Umum, tanpa perlu melakukan pencatatan akuntansi sama sekali. Oleh karena itu, laporan keuangan memasukkan representasi pendapatan dan pembayaran pajak. Pernyataan L&O melaporkan pendapatan dalam bentuk gaji, sedangkan akuntansi pajak ditangani di Neraca.

Sangat penting bagi organisasi untuk menetapkan dan mematuhi jadwal yang telah ditentukan untuk persiapan dan penyampaian laporan keuangan, dengan penekanan khusus pada laporan kerugian. Pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu disajikan dalam akun pendapatan dan pengeluaran di neraca, yang dikenal dengan Laporan Laba/Rugi. Proyeksi laba rugi tahun 2022 dan 2021 PT. Apotek Merapi Utama disajikan di bawah ini:

Tabel 3. Perhitungan Laba Rugi Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2022	2021
PENJUALAN BERSIH	43,51	43.436.966.667	14.327.964.032
BEBANPOKOKPENJUALAN	44,51	(35.063.953.61)	(9.213.096.732)
LABAKOTOR		8.373.012.976	5.114.867.300
Beban penjualan	45	(2.498.969.484)	(2.331.337.782)
Beban umum dan administrasi	46	(2.308.392.490)	(1.796.637.805)
Beban penelitian, pengembangan dan surveilans	47	(257.100.567)	(158.002.185)
LABAUSAHA		3.308.550.435	828.889.528
Penghasilan lainnya, bersih	48	99.809.948	272.996.585
Pendapatan keuangan	49	73.629.418	30.690.264
Beban keuangan	50	(826.727.030)	(725.285.474)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.655.262.771	407.290.903
MANFAAT(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	12c	(1.180.099.747)	(179.660.652)
Pajak tangguhan	12c,12e	456.125.575	61.554.927
Total beban pajak penghasilan		<u>(723.974.172)</u>	<u>(118.105.725)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		1.931.288.599	289.185.178

Rekonsiliasi Fiskal

Untuk menjamin akurasi, perlu dilakukan rekonsiliasi data dari sistem atau subsistem berbeda yang pernah menangani transaksi keuangan yang sama. Istilah "reorganisasi keuangan" digunakan untuk menggambarkan prosedur konsolidasi catatan keuangan yang terpisah ke dalam catatan akuntansi terpadu yang sesuai dengan standar peraturan. Hal ini harus kita lakukan agar bisa lolos PKP (penghasilan sebelum pajak).

Istilah "konsolidasi fiskal", atau "rekonsiliasi" dalam pengertian akuntansi teknisnya, mengacu pada metode yang digunakan untuk merekonsiliasi perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun menggunakan satu set prinsip akuntansi dan laporan keuangan pribadi yang disusun menggunakan serangkaian prinsip berbeda. Secara umum, laporan keuangan di Indonesia disusun menggunakan

standar akuntansi Indonesia, yang mungkin sejalan atau tidak dengan hukum Indonesia.

Tujuan konsolidasi keuangan di bidang perpajakan adalah untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sesuai dengan peraturan keuangan terkait dan menjadikan laporan tersebut sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan perusahaan, yang kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang otoritas pajak. Rekonsiliasi fiskal yang dimuat dalam perpajakan berupa lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang memuat penyesuaian antara laba dan rugi komersial yang dihitung sebelum pajak dengan laba dan rugi yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang disusun atas jumlah pengeluaran atau beban dan pendapatan.

Bagaimana laba perusahaan setelah pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak ditunjukkan pada laporan laba rugi:

**Tabel 4. Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021
 (dalam ribuan)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	2.655.262.771	407.290.903
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(401.656.608)	(91.440.700)
Eliminasi	237.603.533	86.436.925
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>2.491.209.696</u>	<u>402.287.128</u>
Beda waktu:		
Beban imbalan pascakerja	60.591.402	48.255.435
Pembayaran manfaat Cadangan kerugian	(25.166.721)	(15.378.709)
Penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	57.023.717	11.949.756
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(19.562.785)	(2.344.631)

dan lain-lain

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	35.940.504	9.708.004
Pemulihan cadangan kerugian penurunan Nilai persediaan	(5.120.278)	(6.755.656)
Liabilitas kontrak Beban tanggungan penugasan	2.005.523.672	-
	(6.317.631)	-
Total beda waktu	<u>2.102.911.880</u>	<u>45.434.199</u>
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	195.262.210	44.425.846
Pendapatan deviden	(6.351.759)	-
Penghasilan dikenakan pajak final	(70.983.619)	(14.304.130)
Total beda tetap	<u>117.926.832</u>	<u>30.121.716</u>
Taksiran penghasilan kenapajak Perusahaan	4.712.048.408	477.843.043
Beban pajak kini dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka	1.036.650.650	105.125.469
Pasal 22	35.319.430	26.464.382
Pasal 23	131.796	173.466
Pasal 25	<u>107.229.997</u>	<u>57.053.745</u>
Total	<u>142.681.223</u>	<u>83.691.593</u>

Taksiran kurang bayar		
pajak		
penghasilan	<u>893.969.427</u>	<u>21.433.876</u>
badan		

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba- Rugi konsolidasian	2.655.262.771	407.290.903
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(401.656.608)	(91.440.700)
Eliminasi	237.603.533	86.436.925
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>2.491.209.696</u>	<u>402.287.128</u>
Manfaat pajak sesuai tarif pajak efektif yang berlaku	548.066.133	88.503.168
Pengaruh pajak atas beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	42.957.686	9.773.686
Pendapatan deviden	(1.397.387)	-
Penghasilan dikenakan pajak final	(15.616.396)	(3.146.908)
Penyesuaian pajak tangguhan perusahaan	625.075	(48.009.144)
Beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>574.635.111</u>	<u>47.120.802</u>

Entitas		
Anak:	122.223.583	74.535.183
Pajak kini		
Penyesuaian tahun lalu	21.225.514	-
Pajak tangguhan	5.889.964	(3.550.260)
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>723.974.172</u>	<u>118.105.725</u>

Prakiraan keuangan dan bisnis jelas dihitung secara berbeda, terbukti dari PT. Data Farmasi Merapi Utama. Dari segi moneter berarti lebih banyak penghasilan kena pajak (PKP). Hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh departemen fiskal untuk menurunkan belanja. Suatu perusahaan dapat mengurangi biaya overhead dengan cara ini jika perusahaan memilih untuk tidak membayar pajak tambahan yang timbul dari penerapan penuh seluruh ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi dan laporan keuangan individual yang disusun berdasarkan serangkaian prinsip berbeda dapat direkonsiliasi melalui proses yang disebut "konsolidasi fiskal", yang merupakan bagian dari prosedur operasi standar profesi akuntansi. Praktik standar penyusunan laporan keuangan di Indonesia tidak selalu konsisten atau sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pengadaan publik di negara tersebut. Sebaliknya, tujuan konsolidasi keuangan adalah untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Prinsip: pernyataan tersebut menjadi dasar penyusunan SPT PPh perusahaan, yang kemudian disampaikan kepada fiskus yang berwenang. Peraturan perundang-undangan mengatur tentang rekonsiliasi keuangan dalam bentuk laporan SPT tahunan badan PPh, yang merinci bagaimana cadangan kerugian komersial yang ditentukan sebelum adanya perpajakan dibandingkan dengan cadangan kerugian yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekonsiliasi keuangan dapat bersifat permanen atau permanen. bersifat sementara, tergantung keadaan. Jika suatu transaksi telah dicatat sebagai pendapatan atau beban sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka diperlukan jenis rekonsiliasi keuangan yang berbeda. Ketika suatu transaksi tidak dapat secara otomatis dihilangkan pada periode berikutnya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Amerika Serikat, maka timbul perbedaan antara penghasilan akuntansi kena pajak dan tidak kena pajak, dan perbedaan ini harus direkonsiliasi. Istilah "laba sebelum bunga dan pajak" (EBIT) digunakan untuk menggambarkan total laba perusahaan sebelum dikurangi bunga atau pajak. Sebaliknya, laba setelah pajak adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya seperti pajak, bunga, dan biaya overhead bisnis lainnya. Dalam menghitung kerugiannya, perusahaan tidak hanya harus memperhitungkan biaya-biaya di atas, tetapi juga biaya penjualan dan operasional. Saat menjalankan bisnis di lingkungan

sanitasi, harga eceran tidak berpengaruh pada komisi penjualan. Tidak ada batasan jangka waktu komisi penjualan sehubungan dengan biaya operasional perusahaan. Biaya yang terkait dengan produksi, manajemen, penjualan, dan pemasaran adalah semua hal yang dapat dikurangi melalui kebersihan operasional. Kesenjangan dalam pengakuan pendapatan terus menjadi kontributor utama kesulitan ekonomi. Meskipun hal ini dianggap sebagai pendapatan dalam praktik akuntansi konvensional, namun hal ini diabaikan dalam Undang-undang PPh. Ada tiga jenis kejadian kena pajak: (1) kejadian yang dikecualikan, (2) kejadian yang dikenakan pajak menurut standar pengakuan penghasilan, dan (3) kejadian yang perlakuan perpajakannya bersifat definitif.

Tabel 5. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 - 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	195.262.210	44.425.846
Pendapatan deviden	(6.351.759)	-
Penghasilan dikenakan pajak final	(70.983.619)	(14.304.130)
Total	<u>117.926.832</u>	<u>30.121.716</u>
beda tetap		

Berdasarkan data yang disajikan di atas, nampaknya divergensi fiskal akan terus berlanjut hingga tahun 2022). Judul 36, bagian PPh Kode Amerika Serikat menguraikan konsekuensi hukum atas kesalahan pengelolaan fiskal. Tingkat pertumbuhan positif dan negatif dapat dilihat di pasar keuangan. Pendapatan usaha setelah pajak, atau PhKP, adalah fokus dari anggaran arus kas positif. Di sisi lain, penurunan pajak korporasi atau pajak PhKP merupakan perkembangan fiskal yang kurang menguntungkan. Pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel di atas, koreksi fiskal diperkirakan akan negatif. Pendapatan dan pengeluaran dipengaruhi oleh jeda waktu antara sistem akuntansi dan sistem penggajian. Meskipun menurut undang-undang perpajakan, keuntungan diakui secara bersamaan pada saat diterima, sedangkan dalam akuntansi komersial laba diakui secara bersamaan. tidak diakui selama lebih dari satu tahun. Akibat kesenjangan tersebut, pajak harus dipungut selain kewajiban perpajakan yang sedang dikurangi, dan pajak juga harus dipungut atas kegiatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, transaksi akuntansi bisnis dan transaksi pajak adalah sama, namun alokasi biaya terjadi pada waktu yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh dimana, menurut undang-undang, perbedaan zona waktu memerlukan rekonsiliasi moneter setelah adanya

pengakuan yang berbeda. (1) Penipuan garis lurus dan pengurangan gaji merupakan satu-satunya bentuk penipuan legal yang dapat dilakukan. Saat menghitung nilai persediaan, FIFO adalah satu-satunya pilihan yang dapat diterima. (2) Menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan adalah tindakan ilegal, dengan beberapa pengecualian bagi bisnis yang mematuhi undang-undang PPh.

Tabel 6. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 - 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beda waktu:		
Beban imbalan pascakerja	60.591.402	48.255.435
Pembayaran manfaat cadangan kerugian	(25.166.721)	(15.378.709)
Penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	57.023.717	11.949.756
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	(19.562.785)	(2.344.631)
Cadangan kerugian penurunan nilai Persediaan	35.940.504	9.708.004
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(5.120.278)	(6.755.656)
Liabilitas kontrak beban tangguhan penugasan	2.005.523.672	-
	(6.317.631)	-
Total beda waktu	2.102.911.880	45.434.199

Krisis keuangan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor berbeda, seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas

pada perubahan nilai aset suatu perusahaan, penurunan gaji karyawan, pembalikan kerugian yang telah dicatat sebelumnya, atau penambahan keuntungan yang belum dicatat sebelumnya. Ketidakseimbangan beban pasca kerja, cadangan kerugian pembaikan nilai penerimaan usaha dan lain-lain, cadangan kerugian pembaikan nilai persediaan dan liabilitas kontak yang berkaitan dengan koreksi fiskal positif yang terjadi. Korosi moneter negatif diakibatkan oleh hal-hal berikut: pembayaran dividen (pembayaran manfaat), pemotongan biaya (pemulihan cadangan kerugian), pemotongan biaya (pemulihan cadangan kerugian), dan pemotongan biaya (beban tanggungan penugasan). wajib pajak adalah perbandingan antara penghasilan kena pajak pada suatu periode berjalan dengan jumlah penghasilan kena pajak pada tahun yang bersangkutan. Sementara itu, tergantung bagaimana Anda melihatnya, perpajakan secara tangen dapat dilihat sebagai beban pajak (beban pajak tanggungan) atau rejeki nomplok pajak (pendapatan pajak tanggungan).

Tabel 7. Pajak Kini dan Pajak Tanggungan Dalam Laporan Keuangan Komersial PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

		2022	2021
MANFAAT (BEBAN)			
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	12c	(1.180.099.747)	(179.660.652)
Pajak tanggungan	12c,12e	456.125.575	61.554.927
Total beban pajak penghasilan		<u>(723.974.172)</u>	<u>(118.105.725)</u>

Tabel 8 Pajak Kini dan Pajak Tanggungan dalam Rekonsiliasi Fiskal PT. Merapi Utama Pharma tahun 2022 – 2021 (dalam ribuan)

	2022	2021
Beban pajak kini	<u>1.036.650.650</u>	<u>105.125.469</u>
Penyesuaian pajak tanggungan Perusahaan	625.075	(48.009.144)

Dari tabel di atas terjadi perbedaan perhitungan pajak kini dan pajak tanggungan antara laporan keuangan komersial dan rekonsiliasi fiskal.

KESIMPULAN

Penelitian dan analisis penulis mengenai penerapan akuntansi akrual dan dampaknya terhadap pendapatan pada PT. Merapi Utama Pharma Medan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: PT. Merapi Utama Pharma Medan belum sepenuhnya menerapkan praktik akuntansi penggajian yang mematuhi persyaratan dan tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan terkait. Laporan rekonsiliasi diperlukan karena perbedaan metode pencatatan yang digunakan dalam akuntansi

keuangan dan akuntansi pemerintah untuk pendapatan dan pengeluaran. Rekonsiliasi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan durasinya: permanen dan sementara. Konsolidasi keuangan adalah proses dimana terdapat varian positif dan negatif dalam arus kas. Perbedaan penghasilan kena pajak dapat disebabkan oleh pengakuan pengeluaran tertentu dalam catatan pajak yang tidak diklasifikasikan seperti itu dalam catatan keuangan. Pengeluaran tersebut berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan analisis sebelumnya, penulis menyajikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses negosiasi. Sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan pedoman yang kuat dalam penerapan akuntansi kas kecil, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang kas kecil terkait. Mengingat bahwa pemerintah telah menetapkan peraturan dalam undang-undang ini, kekhawatiran bisnis akan berkurang dalam proses penyusunan laporan keuangan mereka. Sistem akuntansi keuangan yang kuat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dengan memfasilitasi perencanaan masa depan, merancang strategi optimalisasi laba, memperkirakan aliran pendapatan di masa depan, dan menerapkan prinsip akuntansi pada peristiwa bisnis dunia nyata untuk evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. H., Radistya, D., & Murti, K. D. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua. *Seminar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003). *Accrual Budgeting and Accounting in Government and Its Relevance for Developing Member Countries*. Philippines: Asian Development Bank.
- Granof, E. M., & Khumawala., B. S. (2013). *Government and Not-for-Profit Accounting, Concepts and Practices* (6th ed.). New York: Wiley.
- Hanum, Z., Rukmini, & Hasibuan, J. S. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 212-219.
- Hassan, M. M. (2013). Debates on accrual accounting in the public sector: A discrepancy between practitioners and academicians. *Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference-APIRA Kobe*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- International Federation of Accountants. (2011). *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Public Sector Entities. Study 14*. New York.
- Jones, R., & Maurice, P. (2000). *Public Sector Accounting* (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
- Lumingkewas, V. A. (2013). Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 199–206.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan* (1st ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyana, B. (2011). *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD*. Jakarta: UNS.
- Mustofa, H. (2008). *Basis Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Jendral Parbendaharaan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Price Waterhouse Cooper. (2013). *Towards A New Era in Government Accounting and Reporting*.
- Rama, D. V., & Jones, F. L. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Sari, E. N. (2018). Budaya Organisasi dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 3(3). Retrieved from <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/07/33.978-623-90018-0-3.pdf>
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suryanovi, S., & Purwanti, D. (2013). *Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan badan Basis Akrual "Formulasi Dengan Menggunakan Model Statistik*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.
- Tickell, G. (2010). Cash To Accrual Accounting: One Nations Dilemma. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(11), 71–78. <https://doi.org/10.19030/iber.v9i11.32>
- Triharto, A. B. (2013). *Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan Entri Berpasangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Winarna, J. (2006). *Dasar Akuntansi Pemerintahan. Tinjauan Kritis Implementasi SAP*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Wynne, A. (2007). Is the move to accrual based accounting a real priority for public sector accounting? *International Journal on Governmental Financial Management*, (September), 25–38.